

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi kuantitatif yang dibuat oleh perusahaan dan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Salah satu laporan keuangan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba. Investor dan kreditor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang.

Manajemen laba sebagai bentuk dari manipulasi laporan keuangan, hingga saat ini belum mempunyai batasan mengenai definisi dari manajemen laba. Menurut Davidson, Stickney dan Weil dalam Sulistyanto (2008)[1], manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi yang diterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

National Association of Certified Fraud Examiners dalam Sulistyanto (2008)[2], mendefinisikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, salah satunya adalah Fenomena adanya praktik manajemen laba baru baru ini yaitu terjadi pada manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food, fenomena ini bermula dari ambudarulnya bisnis beras yang dikelola anak usaha PT Indo Beras Unggul karena terbukti mengoplos. Pasca kasus tersebut, kesulitan keuangan mulai mendera PT Tiga Pilar Sejahtera Food yang dimulai dari kesulitan membayar bunga dan pokok obligasi yang berujung pada gagal bayar. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) manajemen lama diduga menggelembungkan Rp 4 triliun di laporan keuangan tahun 2017. Hal ini terungkap dalam laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) atas manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019 Dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Selain penggelembungan Rp 4 triliun tersebut, ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak,

depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut. Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Antara lain menggunakan pencairan pinjaman Grup AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA. Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (*disclosure*) yang memadai kepada *stakeholders* secara relevan. Selain temuan tersebut, hal mendasar dari hasil laporan EY tersebut adalah adanya pencatatan keuangan yang berbeda dalam data internal dengan pencatatan yang digunakan auditor keuangan dalam proses mengaudit laporan keuangan 2017. Belum lagi, EY mendasari dari informasi manajemen baru bahwa manajemen lama AISA membuat pembukuan yang berbeda untuk tujuan eksternal, misalnya untuk kepentingan audit eksternal. (sumber : www.detik.com).

Berikut adalah tabel data piutang usaha, persediaan, aset tetap, penjualan dan laba yang diduga terjadi penggelembungan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA).

Tabel 1.1 Data Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Penjualan dan Laba PT. Tiga Pilar Sejahtera Food

TAHUN	PIUTANG USAHA	PERSEDIAAN	ASET TETAP	PENJUALAN	LABA
2015	1.978.613,00	1.569.104,00	2.344.759,00	6.010.895,00	500.435,00
2016	2.928.514,00	2.069.726,00	2.587.235,00	6.545.680,00	898.431,00
2017	2.702.913,00	1.401.390,00	3.178.987,00	4.920.632,00	(967.484,00)

Kasus di atas merupakan contoh praktik manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengelabui para *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan. Tindakan manajemen laba dilakukan agar laporan keuangan perusahaan selalu terlihat baik sehingga para investor tidak memberikan pandangan yang buruk dan akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Maka diperlukan edukasi kepada para investor untuk lebih memahami apa itu manajemen laba, serta berbagai elemen yang dapat mempengaruhi manajemen laba, agar investor tidak salah langkah dalam melakukan kegiatan investasinya di lantai bursa saham. Healy dan Wahlen (1999) dalam Nayiroh (2013)[3] menyatakan manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat *mislead* pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada dalam suatu perusahaan. Motif utama dilakukan praktik manajemen laba adalah untuk *mislead* bagi pengguna

informasi keuangan dan untuk mempengaruhi kontrak-kontrak yang akan dihasilkan oleh perusahaan.

Berdasarkan kasus skandal pelaporan keuangan telah menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan untuk meminimalkan manajemen laba. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme monitoring yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham maupun pihak lainnya. Karena manajemen laba itu merupakan hal yang *negative* maka harus dikurangi, dengan cara menerapkan tata kelola yang baik diperusahaan yaitu dengan adanya *good corporate governance* yang baik.

Agency theory memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba dapat diminimalisir dengan pengawasan melalui *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007)[4].

Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini di proksikan dengan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.

Menurut Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan definisi Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dengan adanya Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan maka dapat menurunkan tingkat manajemen laba. Keefektifitasan dewan komisaris dalam menjalankan perannya dapat dilihat dari aktivitas, jumlah anggota, independensi serta kompetensi dewan

komisaris (Junaedi dan Farina, 2017)[5]. Apabila dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya secara efektif maka dapat mengurangi atau mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Berikut fenomena komposisi anggota dewan komisaris di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.2 Data Jumlah Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman.

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris		
		2015	2016	2017
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)	5	5	5
2	PT Akasha International (ADES)	3	3	3
3	PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	4	4	3
4	PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)	6	5	5
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	6	6	6
6	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	8	8	8
7	PT Multi Bintang Indonesia TBK (MLBI)	7	8	6
8	Mayora Indah Tbk (MYOR)	5	5	5
9	Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN)	6	6	6
10	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)	3	3	3
11	Sekar Laut Tbk (SKLT)	3	3	3
12	Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ)	3	3	3

Dalam setiap perusahaan harus mempunyai dewan komisaris independen, dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2(dua) orang anggota dewan komisaris, 1(satu) diantaranya adalah dewan komisaris independen. Dari data laporan anggota komisaris diatas dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang memiliki banyaknya anggota dewan komisaris. Hal ini menandakan adanya indikasi akan terjadinya praktik manajemen laba karena semakin banyaknya jumlah dewan komisaris maka semakin besar kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Ada dua teori yang mendasari dampak ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba, yaitu ukuran dewan komisaris yang kecil akan lebih baik dan ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif (Bliss, 2011)[6]. Dewan komisaris yang mempunyai anggota banyak akan menghadapi beberapa kendala, misalnya pengambilan keputusan akan lebih lambat. Proses pengambilan keputusan merupakan hasil dari kompromi dari anggota dewan komisaris, sehingga dengan jumlah anggota yang lebih banyak maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, ukuran dewan komisaris yang lebih banyak akan mengakibatkan adanya anggota dewan komisaris yang menjadi *free-rider*. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris yang lebih kecil akan lebih baik dalam pengambilan keputusan (Bliss, 2011; Jensen,

2010)[7]. Sedangkan argumentasi yang kedua berdasarkan asumsi bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang banyak menunjukkan pakar di dalam dewan komisaris tersebut banyak. Dengan demikian, pakar yang lebih banyak ini akan lebih baik dalam menangani permasalahan yang dihadapi (Ghosh, Marra, & Moon, 2010)[8].

Penelitian yang dilakukan oleh Bliss (2011)[9] menunjukkan bahwa dewan komisaris yang besar menghadapi permasalahan dalam hal komunikasi dan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang besar cenderung akan membayar biaya audit yang lebih besar. Hal ini menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih kecil mempunyai keunggulan dibandingkan dewan komisaris dengan jumlah anggota yang banyak. Jumlah anggota dewan yang lebih kecil mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Kumar & Singh, 2013)[10]. Hasil ini sejalan dengan penelitian Cornett, McNutt dan Tehranian (2009)[11] yang menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam mengurangi manajemen laba.

Selain dewan komisaris, ada juga dewan direksi yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Menurut KNKG (2006)[12] Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama yang dapat melakukan monitoring terhadap manajer (Win, 2009)[13]. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang. Dewan direksi harus punya andil untuk mengurangi terjadinya manajemen laba, dewan direksi dituntut pertanggung jawabannya oleh karena itu dewan direksi tidak akan mempengaruhi akuntannya untuk melakukan manajemen laba. Dewan direksi merupakan sistem manajemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance* untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berikut fenomena komposisi anggota dewan direksi di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.3 Data Jumlah Anggota Dewan Direksi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Dewan Direksi		
		2015	2016	2017
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)	3	3	4
2	PT Akasha International (ADES)	4	3	3
3	PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	4	4	4
4	PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)	5	5	5
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	9	9	9
6	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	10	10	10
7	PT Multi Bintang Indonesia TBK (MLBI)	4	4	4
8	Mayora Indah Tbk (MYOR)	5	5	5
9	Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN)	6	5	5
10	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)	6	5	5
11	Sekar Laut Tbk (SKLT)	4	4	5
12	Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ)	3	3	3

Dari data laporan jumlah anggota direksi diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa perusahaan yang mempunyai anggota direksi dengan jumlah yang jumlahnya sedikit ada pula yang jumlahnya banyak. Jika jumlah dewan direksi sedikit, hal ini menandakan adanya indikasi akan terjadinya praktik manajemen laba karena semakin banyaknya jumlah dewan direksi maka semakin baik untuk perusahaan tersebut.

Dewan direksi merupakan sistem manajemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance* untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil penelitian Ardiansyah (2014)[14] menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki makna, semakin banyak dewan direksi maka akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap manajemen sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Widyaningdyah (2001)[15] menemukan bahwa ukuran dewan direksi sebagai mekanisme *corporate governance* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan Midiastuty dan Mach foedz (2003)[16] menemukan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Selain dewan direksi dan dewan komisaris ada juga komite audit (Widyati: 2013)[17] merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam

menjalankan fungsi pengawasan. Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit.

Keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Keberadaan Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI,2012)[18]. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit sehingga akan mencegah terjadinya manajemen laba.

Berikut adalah fenomena anggota dewan komite audit yang terjadi di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

Tabel 1.4 Data Jumlah Anggota Komite Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman.

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Komite Audit		
		2015	2016	2017
1	PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)	4	4	4
2	PT Akasha International (ADES)	3	3	3
3	PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	3	3	3
4	PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)	3	3	3
5	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)	3	3	3
6	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)	3	3	3
7	PT Multi Bintang Indonesia TBK (MLBI)	3	3	3
8	Mayora Indah Tbk (MYOR)	3	3	3
9	Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN)	3	3	3
10	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)	3	3	3
11	Sekar Laut Tbk (SKLT)	3	2	3
12	Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ)	3	3	3

Dari data laporan jumlah anggota komite audit diatas dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai jumlah komite audit rata-rata berjumlah 3 (tiga) orang. Berdasarkan peraturan OJK nomor 26/POJK.04/2017 menerangkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3(tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

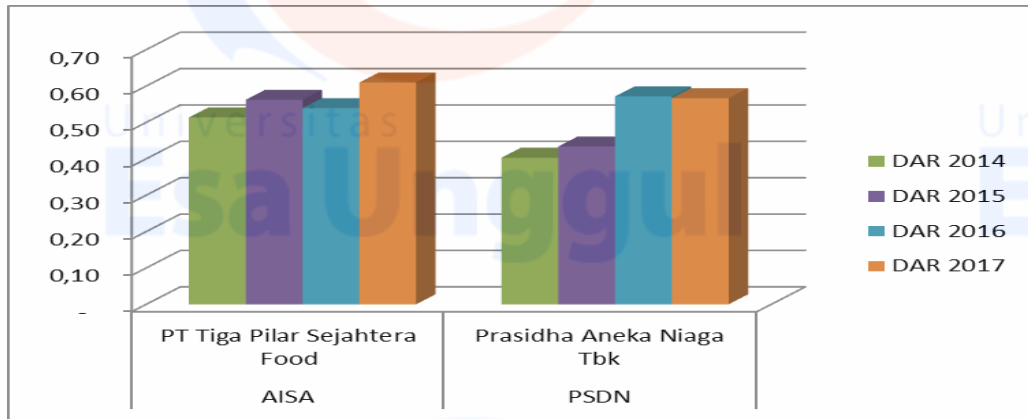
Berdasarkan data laporan jumlah komite audit diatas ternyata masih ada yang jumlah komite auditnya hanya berjumlah 2(dua) orang terjadi pada PT. Sekar Laut Tbk pada tahun 2017. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK juga menandakan adanya indikasi akan terjadinya praktik manajemen laba karena semakin banyak jumlah komite audit maka akan mengurangi praktik manajemen laba. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Husni (2013)[19] menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin tinggi ukuran komite audit maka akan mengurangi praktik manajemen laba. Komite audit akan menghambat manajer dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga praktik manajemen laba dapat diminimalisir.

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah *Leverage*. *Leverage* dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam aktivitas manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Ini karena *leverage* menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan yang digunakan akan membiayai utang dan jika hutang banyak perusahaan berusaha untuk meyakinkan kreditor dan investor bahwa walaupun hutangnya banyak perusahaan mampu membayarnya maka perusahaan berusaha meningkatkan laba dengan cara melakukan manajemen laba. Widyaningdyah (2001: 93)[20] perusahaan yang mempunyai *leverage* finansial tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, cenderung melakukan manajemen laba. Hal ini karena perusahaan terancam *default*, yang terjadi karena kurangnya pengawasan oleh pihak *principal* terhadap manajemen. Akibat dari hal tersebut manajemen dapat mengambil keputusan sepihak dan dapat mengambil strategi yang kurang tepat. Manajemen laba akan membuat kinerja perusahaan tampak baik dimana pemegang saham dan publik walaupun perusahaan dalam keadaan terancam *default*. Hal ini karena manajemen dapat menaikkan laba sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki hutang yang banyak, maka potensi untuk menaikkan manajemen laba semakin tinggi.

Hutang yang digunakan secara efektif dan efisien akan meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila dilakukan dengan alasan untuk menarik perhatian para kreditor, maka justru akan memicu terjadinya praktik manajemen laba. Tarjo (2008)[21] melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Rita (2015)[22] menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berikut fenomena *leverage* yang terjadi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

Gambar 1.1 Data Rasio *Leverage* Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman



Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa terjadinya kenaikan rasio *leverage* yang terjadi pada PT. AISA dan PSDN tahun 2014-2017 yang berpotensi akan melakukan manajemen laba. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini PT AISA mengumumkan bahwa pihaknya tidak mampu membayar bunga obligasi dan sukuk ijarah TPS Food I yang jatuh tempo hari Kamis 19 Juli 2018. Total utang tersebut masing-masing senilai Rp 600 miliar dan Rp 300 miliar dengan tingkat suku bunga tetap 10,25% dan fee ijarah sebesar Rp 30,75 miliar per tahun. Jatuh tempo dari utang tersebut juga diperpanjang dari sebelumnya pada 5 April 2018 menjadi tanggal 5 April 2019. Dalam skema sukuk ijarah tersebut, perseroan menjaminkan aset kedua anak usahanya yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) dan PT Poly Meditra Indonesia (PMI).

Selain kedua utang tersebut, AISA juga memiliki utang suku ijarah TPS Food II senilai Rp 1,2 triliun. Utang tersebut juga jatuh tempo pada 5 April 2019 dengan fee ijarah sebesar Rp 126,6 miliar per tahun. Sedangkan dalam skema sukuk ijarah II tersebut, perseroan melakukan penjaminan aset anak usahanya yaitu PT Sukses Abadi Karya Inti (SAKTI). Sementara itu, perseroan juga memiliki utang bank jangka pendek senilai Rp 2,19 triliun dalam buku laporan keuangan AISA 2017. Utang bank jangka pendek tersebut diantaranya utang bank denominasi rupiah senilai Rp 2,17 triliun dengan utang terbesar berasal dari pinjaman sindikasi Rabobank Internasional senilai Rp 1,27 triliun. Lalu utang bank jangka pendek denominasi Dollar AS dengan Citi Bank senilai Rp 12,7 miliar. Selain itu, pada buku tahun 2017 tersebut perseroan masih memiliki utang sewa pembiayaan berupa fasilitas sewa pembiayaan untuk pengadaan mesin pabrik, alat berat dan kendaraan dengan beberapa perusahaan sebesar Rp 105,75 miliar. Namun, utang jangka panjang

perseroan pada periode tersebut setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 578 juta atau turun signifikan dari utang jangka panjang pada 2016 sebesar Rp 189,75 miliar. Utang-utang perseroan pada tahun buku 2017 jika dijumlahkan mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Rasio jumlah utang perseroan pada 2017 juga sangat tinggi dengan aset AISA yang dimiliki pada 2017 yaitu sebesar Rp 8,72 triliun. Pada 2017. Berdasarkan kasus diatas dapat diketahui bahwa adanya pengaruh *leverage* terhadap praktik manajemen laba.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba antara lain adalah Hardi Ibnu Pradito dan Sri Rahayu (2015)[23] menyatakan bahwa dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan menurut Robert Jao Gagaring Pagalung (2011)[24] menyatakan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* melalui kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan jumlah pertemuan audit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Alasan memilih industri makanan dan minuman sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan pertumbuhan nilai pada sektor industri makanan dan minuman ini lebih stabil karena didorong oleh volume penjualan dan tidak terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi perekonomian misalnya inflasi. Walaupun terjadi krisis ekonomi, kelancaran produksi industri makanan dan minuman masih terjamin karena dalam kondisi apapun konsumen tetap membutuhkan produk makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar tetapi kenyataannya masih banyak yang melakukan praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tersebut oleh karena itu penelitian ini mengambil industri subsektor makanan dan minuman.

Motivasi penelitian dalam penelitian ini adalah adanya keinginan dari penulis untuk menerapkan dan mensosialisasikan terkait dengan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga laporan keuangan menjadi transparan dan tidak mengandung unsur manajemen laba, selain itu ingin mengetahui faktor yang menyebabkan manajemen laba diantaranya pengaruh dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan *leverage*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menganalisis **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan manajemen laba.
2. Masih banyak perusahaan yang mempunyai dewan komisarisnya banyak sehingga ada kemungkinan menimbulkan manajemen laba.
3. Masih banyak perusahaan yang mempunyai dewan direksi sedikit dan pergantian dewan direksi sehingga ada kemungkinan menimbulkan manajemen laba.
4. Masih banyak perusahaan yang mempunyai komite audit yang jumlahnya hanya 3(tiga) orang bahkan kurang dari 3(tiga) orang sehingga ada kemungkinan menimbulkan manajemen laba.
5. Masih banyak perusahaan yang rasio *leverage* nya naik sehingga ada kemungkinan menimbulkan manajemen laba.
6. Adanya kegiatan akuntansi yang tidak tepat karena untuk menutupi kerugian perusahaan dengan melebih-lebihkan jumlah keuntungan demi menarik perhatian pihak investor.
7. Manajemen laba dilakukan agar laporan keuangan perusahaan selalu terlihat baik, walaupun tidak melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga para investor tidak memberikan nilai buruk dan akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit serta *leverage* dengan pengukuran menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) terhadap tingkat manajemen laba, dan juga manajemen laba yang digunakan diukur dengan menggunakan *the modified jones model*. Digunakannya *good corporate governance* sebagai faktor yang mempengaruhi manajemen laba karena dimungkinkan *good corporate governance* belum efektif dalam meminimalisir manajemen laba. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya beberapa kasus tentang kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan *leverage* sebagai faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba karena besar kecilnya *leverage* keuangan perusahaan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kondisi suatu perusahaan sehingga dapat mempengaruhi tindakan manajemen. Penelitian meliputi perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Penelitian ini

menggunkan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman karena perusahaan manufaktur memiliki pengaruh cukup besar dalam dinamika perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sehingga diharapkan pemilihan sampel perusahaan manufaktur ini dapat merepresentasikan kondisi perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit serta *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?
2. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris secara parsial terhadap manajemen laba secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi dewan direksi terhadap manajemen laba secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh GCG dengan proksi komite audit terhadap manajemen laba secara parsial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
5. Apakah terdapat pengaruh *leverage* dengan menggunakan pendekatan *debt to asset ratio* (DAR) secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit serta *leverage* secara bersama-sama terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan komisaris terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
3. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi dewan direksi terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

4. Menganalisis pengaruh GCG dengan proksi komite audit terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
5. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, sebagai bahan saran untuk penelitian selanjutnya juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana mekanisme dari *good corporate governance* dan *leverage* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Investor

Memberikan kontribusi bagi para Investor terutama sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan *go publik*, terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, dan *Leverage* dalam kaitannya dengan kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangan untuk membantu para pengambil keputusan.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan pencapaian kepentingan manajemen.